

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Karena pembangunan daerah merupakan salah satu indikator atau penunjang dari terwujudnya pembangunan nasional. Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Kedua Undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu dicapai kinerja keuangan daerah yang baik seiring tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.

Diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

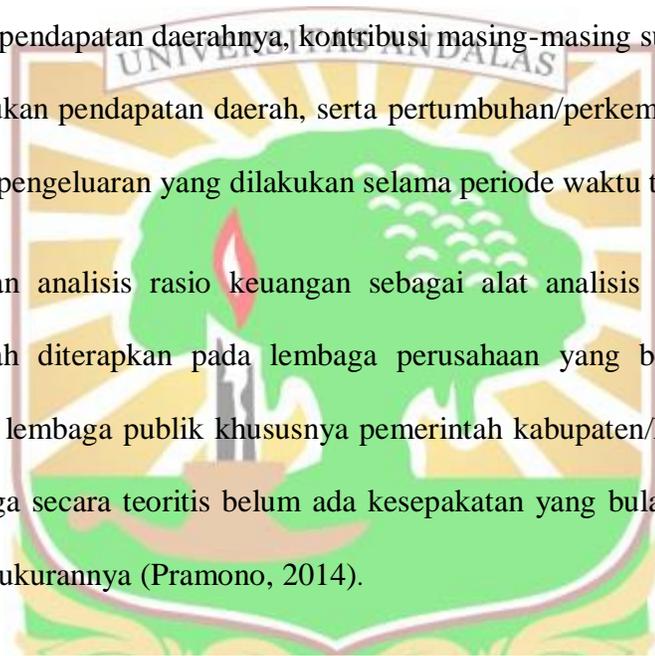
Menurut Halim (2007) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Salah satu elemen dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Halim, 2007). Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten/kota masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Pramono, 2014).

Kota Bukittinggi adalah salah satu Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan otonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah tersebut serta menghasilkan pemerataan pertumbuhan perekonomian. Berikut adalah gambaran Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi tahun 2012-2016:



Tabel 1.1
Tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016

Tahun	PAD
2012	45.227.410.138
2013	55.204.000.416
2014	59.150.515.589
2015	62.578.835.629
2016	71.303.771.735

Sumber: DPKAD Kota Bukittinggi

Dari data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2012-2016. Dari data pendapatan asli daerah (PAD) tersebut menunjukkan pada tahun 2012 merupakan pendapatan asli daerah terendah di Kota Bukittinggi yaitu sebesar Rp.45.227.410.138. Tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp.9.976.590.278. Tahun 2014 naik sebesar Rp.3.946.515.173. Kemudian tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 3.428.320.040 dan tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp. 8.724.936.106. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan PAD yang bersumber dari kelompok pajak daerah dan lain lain PAD yang sah.

Pemerintah Kota Bukittinggi terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan daerahnya dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah dilihat dari berbagai aspek yaitu mampu memanfaatkan pontensi daerahnya dengan salah satu cara melalui pemanfaatan semaksimal mungkin atas sumber daya daerah, pajak daerah dan retribusi daerah. PAD sebagai salah satu

penerimaan daerah mencerminkan tingkat kinerja keuangan daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang.

Alasan penulis memilih Kota Bukittinggi sebagai objek penelitian karena Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota terpadat kependudukannya di Provinsi Sumatera Barat, Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Kinerja pendapatan keuangan Kota Bukittinggi melalui beberapa rasio. Serta ingin melihat bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi tiap tahunnya dan sekaligus melihat tingkat ketergantungan kota Bukittinggi terhadap transfer atau suntikan dana dari pemerintah pusat.

Pada penelitian kali ini penulis berpedoman kepada beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh, Boedi (2012), Agustina (2013), dan beberapa penelitian lainnya. Pada penelitian terdahulu tersebut mereka menggunakan beberapa rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya rasio kemandirian, efisiensi dan efektivitas, ketergantungan, keserasian dan derajat desentralisasi fiskal. Ada beberapa rasio yang menunjukkan nilai positif atau baik dan ada beberapa rasio yang sering kali bernilai negatif atau rendah disetiap penelitian. Rasio tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih sangat kurang dalam kinerja keuangannya. Rasio-rasio tersebut adalah rasio kemandirian, ketergantungan, derajat sentralisasi fiskal dan rasio efektivitas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menggunakan empat rasio tersebut yang merupakan bagian dari rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pendapatan Kota Bukittinggi.

Pada penelitian yang penulis lakukan saat ini, perbedaan itu terletak pada objek atau daerah penelitian, tahun penelitian dan rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan. Pada penelitian kali ini penulis ingin merincikan lingkup penelitian kepada analisis kinerja pendapatan. Penulis bermaksud akan menggunakan analisis rasio berupa analisis kinerja pendapatan yang terdiri dari: analisis varians pendapatan, analisis rasio pertumbuhan pendapatan, dan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini terdiri dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio derajat sentralisasi fiskal dan rasio efektivitas, sesuai alasan yang penulis jabarkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul penelitian **Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2012-2016.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncul beberapa masalah yang akan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kinerja pendapatan keuangan Kota Bukittinggi periode 2012-2016 yang dilihat dari rasio varians pendapatan ?
2. Bagaimanakah kinerja pendapatan keuangan Kota Bukittinggi periode 2012-2016 yang dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan ?
3. Bagaimanakah kinerja pendapatan keuangan Kota Bukittinggi periode 2012-2016 yang dilihat dari rasio keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan Kota Bukittinggi periode 2012-2016 dengan rasio varians pendapatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan Kota Bukittinggi periode 2012-2016 dengan rasio pertumbuhan pendapatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan Kota Bukittinggi periode 2012-2016 dengan rasio keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan untuk perkembangan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam segi pendapatan serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.

2. Bagi masyarakat umum

Dengan memberikan hasil yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, maka masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan yang meningkat.

3. Bagi dunia akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik.

4. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai keuangan daerah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah itu sendiri serta sebagai syarat penyelesaian pendidikan S1 pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.5 Batasan Penelitian

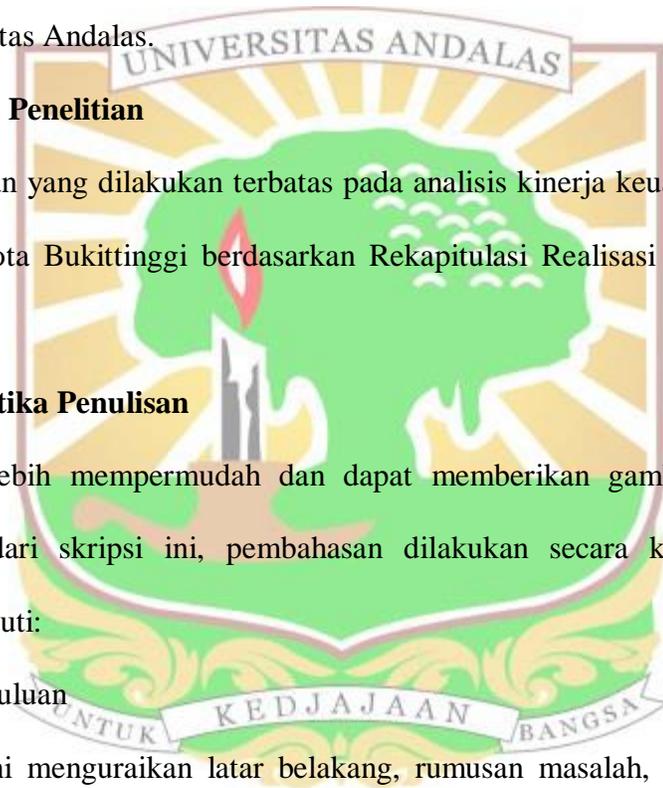
Penelitian yang dilakukan terbatas pada analisis kinerja keuangan pendapatan daerah pada Kota Bukittinggi berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2012-2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan/ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini.



BAB II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai Otonomi Daerah, Keuangan Daerah dan Ukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan tahap pengujian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas analisis pengolahan data serta pembahasannya yang merupakan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan juga saran-saran untuk referensi penelitian selanjutnya.

